

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadikan setiap kepala daerah saling berlomba menunjukkan pemikiran kreatif yang akan diberikan kepada masyarakatnya, entah dengan menciptakan suatu program yang baru dan lebih baik atau melanjutkan program yang sudah ada dan hanya memperbaikinya. Inovasi menjadi salah satu langkah dari pemikiran kreatif para kepala daerah, hal ini karena inovasi penting dalam perkembangan pada masa sekarang. Salah satu dari inovasi yang banyak diajukan oleh Pemerintah adalah inovasi di bidang pembangunan, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pembangunan seperti menjadi tombak utama dalam hal pencapaian kinerja para birokrat. Hal ini diakibatkan karena pembangunan menjadi bukti yang nyata dan terlihat dalam hal sukses tidaknya masa kepemimpinan seseorang. Namun sangat disayangkan, terkadang pembangunan tidak sesuai dengan yang sedang dibutuhkan.

Salah satu daerah yang mendapat perhatian banyak ketika melibatkan inovasi dalam pembangunannya adalah Kota Bandung. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018 dengan mengeluarkan suatu program pembangunan daerah dengan nama Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) atau disingkat menjadi PIPPK. Program ini telah dirumuskan oleh Walikota saat itu

Ridwan Kamil sejak 2014 lalu dan dituangkan menjadi sebuah kebijakan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1294 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyelenggaraan PIPPK lalu direvisi menjadi Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung dan yang baru ini direvisi kembali menjadi Peraturan Walikota Nomor 436 Tahun 2016 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kota Bandung.

Prinsip dasar dari pembangunan model PIPPK ini adalah melibatkan masyarakat secara utuh, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya harus di inisiasi oleh masyarakat dan pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pembangunannya. Dalam program ini masyarakat Kota Bandung ikut berpartisipasi sampai ketingkat Rukun Warga (RW), dan beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dilibatkan dalam proses pembangunan kewilayahan, dan pemerintah ditingkat kelurahan serta kecamatan menjadi stakeholder dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan masyarakatnya. Dalam hal pendanaan, yang menjadi sumber dana pelaksanaan PIPPK adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung memberikan anggaran untuk keempat organisasi perwakilan masyarakat di setiap Kelurahan melalui setiap Kecamatan yang ada di Kota Bandung dengan harapan anggaran tersebut dapat membiayai seluruh kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dana ini difokuskan untuk

sejumlah program di kewilayahan yang meliputi infrastruktur, kebersihan, dan ekonomi berbasis kerakyatan. Keberhasilan pembangunan bukan hanya didasarkan kepada keahlian aparatur pemerintah ataupun partisipasi masyarakatnya tetapi juga berdasarkan perencanaan matang yang telah dibuat. Perencanaan menjadi hal pertama yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang nantinya akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang akan diperoleh. Dengan adanya perencanaan maka akan disusun pula pengalokasian dana atas suatu program, serta penentuan indikator kinerja dan tingkat pencapaian realisasi. Melalui Laporan Realisasi akan terlihat apakah perencanaan anggaran yang telah dibuat dapat diserap dengan baik dan dapat berperan sebagai alat perencanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kecamatan Cibiru adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung di dalamnya terdapat empat kelurahan yakni Kelurahan Cipadung, Kelurahan Cisarupan, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Pasirbiru. Kecamatan Cibiru ikut serta dalam melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang telah diputuskan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yakni, Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sayangnya, dalam melaksanakan PIPPK Kecamatan Cibiru dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala salah satunya adalah perencanaan yang belum terelisasikan

dengan baik sehingga mempengaruhi dalam penyerapan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari (Cibiru n.d.) Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru dari tahun 2017 sampai dengan 2018 yang memiliki penurunan dalam hal penyerapan. Berikut data dari perencanaan yang belum optimal dalam penyerapannya tersaji dalam Tabel 1.1 mengenai Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru Tahun 2017 – 2018.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru TA 2017 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
<b>2017</b>	6.501.224.408	6.407.244.122	98,55%	93.980.286
<b>2018</b>	4.888.851.904	3.891.356.302	79,60%	997.495.603

*Sumber : Bendahara Kecamatan Cibiru*

Berdasarkan data diatas, Kecamatan Cibiru memiliki penyerapan yang sangat baik pada tahun 2017 dengan merealisasikan anggaran sebanyak 98,55% dari anggaran yang telah direncanakan. Akan tetapi pada tahun 2018 memiliki penurunan yang cukup signifikan dalam penyerapan anggarannya menjadi 79,60% saja. Hal ini ternyata dikarenakan pada tahun 2018 adanya pemotongan pagu anggaran dan adanya anggaran yang belum terserap sepenuhnya. Berikut adalah penjelasan mengenai penyerapan Perkelurahan.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru Per Kelurahan**  
**Tahun 2017**

Kelurahan	LKK	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
Cipadung	Pemberdayaan RW	1.701.854.448	1.701.338.222	99,97%	516.226
	Pemberdayaan PKK	99.999.484	99.999.483	100,00%	1
	Pemberdayaan KARTA	99.999.811	99.991.211	99,99%	8.600
	Pemberdayaan LPM	99.999.656	99.985.509	99,99%	14.147
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.001.853.399</b>	<b>2.001.314.425</b>	<b>99,97%</b>	<b>538.974</b>
Cisurupan	Pemberdayaan RW	999.999.738	998.394.315	99,84%	1.605.423
	Pemberdayaan PKK	99.997.835	99.892.835	99,89%	105.000
	Pemberdayaan KARTA	99.999.965	99.988.395	99,99%	11.570
	Pemberdayaan LPM	100.003.633	99.663.633	99,66%	340.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.300.001.171</b>	<b>1.297.939.178</b>	<b>99,84%</b>	<b>2.061.993</b>
Palasari	Pemberdayaan RW	1.399.999.178	1.310.381.185	93,60%	89.617.993
	Pemberdayaan PKK	100.021.968	99.971.725	99,95%	50.243
	Pemberdayaan KARTA	99.999.910	99.944.910	99,94%	55.000
	Pemberdayaan LPM	99.999.824	99.385.350	99,39%	614.474
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.700.020.880</b>	<b>1.609.683.170</b>	<b>94,69%</b>	<b>90.337.710</b>
Pasirbiru	Pemberdayaan RW	1.199.999.295	1.199.020.568	99,92%	978.727
	Pemberdayaan PKK	99.349.813	99.342.313	99,99%	7.500
	Pemberdayaan KARTA	99.999.933	99.999.051	100,00%	882
	Pemberdayaan LPM	99.999.917	99.945.417	99,95%	54.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.499.348.958</b>	<b>1.498.307.349</b>	<b>99,93%</b>	<b>1.041.609</b>
<b>Jumlah se-Kecamatan Cibiru</b>		<b>6.501.224.408</b>	<b>6.407.244.122</b>	<b>98,60%</b>	<b>93.980.286</b>

*Sumber: Simda Keuangan Kecamatan Cibiru*

Pada tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa penyerapan anggaran yang paling baik diserap Kelurahan Cipadung dengan 99,97% lalu Kelurahan Pasir biru dengan penyerapan sebesar 99,93%, selanjutnya ada Kelurahan Cisurupan dengan persentase penyerapan sebesar 94,69 dan terakhir adalah kelurahan Palasari dengan 94,69%. Namun, sayangnya pada tahun 2018 penyerapan Kecamatan Cibiru mengalami penurunan, berikut perincian realisasi anggaran tahun 2018 disajikan per kelurahan.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru per Kelurahan**  
**Tahun 2018**

<b>Kelurahan</b>	<b>LKK</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>
<b>Cipadung</b>	Pemberdayaan RW	1.051.582.930	650.075.956	61,82	401.506.974
	Pemberdayaan PKK	79.802.500	78.698.472	98,62	1.104.028
	Pemberdayaan KARTA	76.420.000	76.402.900	99,98	17.100
	Pemberdayaan LPM	92.820.000	92.365.000	99,51	455.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.300.625.430</b>	<b>897.542.328</b>	<b>69,01</b>	<b>403.083.102</b>
<b>Cisurupan</b>	Pemberdayaan RW	788.482.677	597.396.800	75,77%	191.085.877
	Pemberdayaan PKK	81.679.900,00	77.657.900	95,08%	4.022.000
	Pemberdayaan KARTA	99.097.875,00	96.513.300	97,39%	2.584.575
	Pemberdayaan LPM	72.510.000,00	72.246.600	99,64%	263.400
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.041.770.452</b>	<b>843.814.600</b>	<b>81,00%</b>	<b>197.955.852</b>
<b>Palasari</b>	Pemberdayaan RW	1.152.890.661	886.415.784	76,89%	266.474.877
	Pemberdayaan PKK	56.223.250	55.218.250	98,21%	1.005.000
	Pemberdayaan KARTA	91.246.000	91.216.000	99,97%	30.000
	Pemberdayaan LPM	77.722.000	77.704.000	99,98%	18.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.378.081.911</b>	<b>1.110.554.034</b>	<b>80,59%</b>	<b>267.527.877</b>
<b>Pasirbiru</b>	Pemberdayaan RW	932.086.211	806.147.440	86,49%	125.938.771
	Pemberdayaan PKK	51.660.000	50.656.300	98,06%	1.003.700
	Pemberdayaan KARTA	98.011.600	96.380.100	98,34%	1.631.500
	Pemberdayaan LPM	86.616.300	86.261.500	99,59%	354.800
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.168.374.111</b>	<b>1.039.445.340</b>	<b>95,62%</b>	<b>128.928.771</b>
<b>Jumlah se-Kecamatan Cibiru</b>	<b>4.888.851.904</b>	<b>3.891.356.302</b>	<b>79,60%</b>	<b>997.495.603</b>	

Sumber: Simda Keuangan Kecamatan Cibiru

Selain itu dalam hal penyerapan anggaran yang kurang optimal itu dikarenakan proses penyelenggaraan pembangunan melalui mekanisme barang dan jasa melalui Tipe 3. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 mengenai swakelola program PIPPK Kelurahan Cipadung.

**Tabel 1.4**  
**Pengadaan barang/jasa PIPPK Kecamatan Cibiru**

No.	Kelurahan	LKK Pelaksana	Pengadaan Barang/Jasa	Ket
1.	Cipadung	RW	Penyedia	
2.	Cipadung	PKK	Tipe 3	
3.	Cipadung	KARTA	Tipe 3	
4.	Cipadung	LPM	Tipe 3	
5.	Cisurupan	RW	Penyedia	
No.	Kelurahan	LKK Pelaksana	Pengadaan Barang/Jasa	Ket
6.	Cisurupan	PKK	Tipe 3	
7.	Cisurupan	KARTA	Tipe 3	
8.	Cisurupan	LPM	Tipe 3	
9.	Palasari	RW	Penyedia	
10.	Palasari	PKK	Tipe 3	
11.	Palasari	KARTA	Tipe 3	
12.	Palasari	LPM	Tipe 3	
13.	Pasirbiru	RW	Penyedia	
14.	Pasirbiru	PKK	Tipe 3	
15.	Pasirbiru	KARTA	Tipe 3	
16.	Pasirbiru	LPM	Tipe 3	

*Sumber : Kecamatan Cibiru (data dikelola peneliti)*

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, Pola Pengadaan barang dan jasa Pemerinthnya dilakukan melalui tipe 3, dimana dalam Peraturan Walikota No. 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung ini merupakan pola pengadaan dengan tipe Swakelola, dimana seharusnya dalam aturan tersebut ada keterlibatan masyarakat baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh kelurahan atau kecamatan. Berdasarkan informasi awal, bahwa dalam prakteknya di kecamatan Cibiru dalam pelaksanaan pembangunan PIPPK menggunakan kontraktor atau pihak

penyedia. Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat hanya merencanakan, namun pada saat pembangunan masyarakat tidak dilibatkan. Jadi, masyarakat disini hanya sebagai penerima manfaat saja. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Cibiru**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Belum terserapnya anggaran PIPPK secara optimal pada tahun 2018 yang menurun secara signifikan dari tahun 2017.
2. Perencanaan yang kurang matang, terlihat dari penyerapannya.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia menyebabkan lamanya waktu pengadaan barang dan jasa.
4. Terjadinya mutasi pegawai sehingga membutuhkan penyesuaian yang tidak sebentar.
5. Ketergantungan pegawai mutasi terhadap pegawai lama.
6. Kurangnya pengarsipan dokumen.
7. Transparansi anggaran yang belum baik.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil penulis, dapat disusun secara spesifik ke dalam pertanyaan sebagai berikut :



1. Seberapa besar pengaruh Proses terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK di Kecamatan Cibiru?
2. Seberapa besar pengaruh Manajemen terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK di Kecamatan Cibiru?
3. Seberapa besar pengaruh Pengambilan Keputusan terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK di Kecamatan Cibiru?
4. Seberapa besar pengaruh Proses, Manajemen dan Pengambilan Keputusan secara bersama-sama terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK di Kecamatan Cibiru?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Proses terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Manajemen terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengambilan keputusan terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Proses, Manajemen dan Pengambilan Keputusan secara bersama-sama melalui Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK di Kecamatan Cibiru.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil atau kegunaan dari penelitian ini antara lain diharapkan dapat memberikan manfaat:

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan berkontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan kita dalam wawasan keilmuan yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran yang dimana kedua teori tersebut berdasarkan referensi yang relevan.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Penulis

a) Mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kelurahan Cipadung Tahun 2015 – 2018.

b) Penelitian ini juga berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dimana peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Cibiru berkaitan dengan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dilakukan di Kecamatan Cibiru yang terdiri dari 4 kelurahan yakni Kelurahan Cipadung, Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Pasirbiru. Program ini merupakan Program Wali Kota Bandung yang telah dirumuskan sejak tahun 2014 dan mulai terlaksana dari tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini berkaitan dengan Perencanaan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah bahwa perencanaan itu merupakan sebuah langkah awal dalam melakukan kegiatan suatu program. Perencanaan juga menjadi penentu dari sukses tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan. Ketika perencanaan dilakukan dengan sesuai maka akan menghindari banyaknya terjadi permasalahan dimasa yang akan datang.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang dan sebelumnya. Perencanaan dimulai dari proses penetapan tujuan dengan menentukan strategi secara menyeluruh seta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Perencanaan dapat dilihat dalam 3 hal, menurut Ernie dalam buku Halim (2013) :

1. Dari sisi Proses, fungsi perencanaan adalah sebagai proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.
2. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.
3. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari.  
(Ernie dan Kurniawan, 2005: 165)

Perencanaan anggaran menjadi hal yang vital dan menjadi langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan, karena nantinya perencanaan anggaran akan bersangkutan dengan beberapa hal seperti pelaksanaan, pengawasan, dan bahkan penyerapan anggaran. Dalam sebuah perencanaan harus melihat tiga hal, yakni dari sisi proses, sisi manajemen, dan juga dari sisi pengambilan keputusan. Maka dari itu, akan terlihat sejauhmana peran dari masing-masing elemen dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Selanjutnya, peneliti akan membahas terkait dengan variabel terikat mengenai penyerapan anggaran. (Halim 2014:84) menjelaskan, bahwa penyerapan anggaran yaitu:

“Pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari

anggaran). Secara lebih mudah orang awam menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, maka penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat periode tertentu”.

Melihat hal tersebut bahwa penyerapan anggaran pada dasarnya mengenai suatu realisasi yang telah dilaksanakan oleh suatu instansi, dan dapat digunakan sebagai cerminan dari baik dan buruknya suatu kinerja para birokrat pemerintahan. Untuk mengetahui penyerapan yang baik, maka kita dapat memahami faktor-faktor yang mampu mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran diantaranya adalah sebagai berikut: (Halim 2014:91)

1. Lemahnya perencanaan anggaran

Rendahnya daya serap anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

2. Lamanya proses pembahasan anggaran

Lamanya proses pembahasan anggaran karena banyaknya tarik ulur kepentingan. Seharusnya pembahasan anggaran sudah final sampai rincian alokasi anggaran sampai dengan bulan Desember, sehingga bulan Januari tahun berikutnya pemerintah daerah sudah siap melaksanakan program yang telah disepakati. Tarik ulur ini

efeknya juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran.

3. Lambannya proses tender

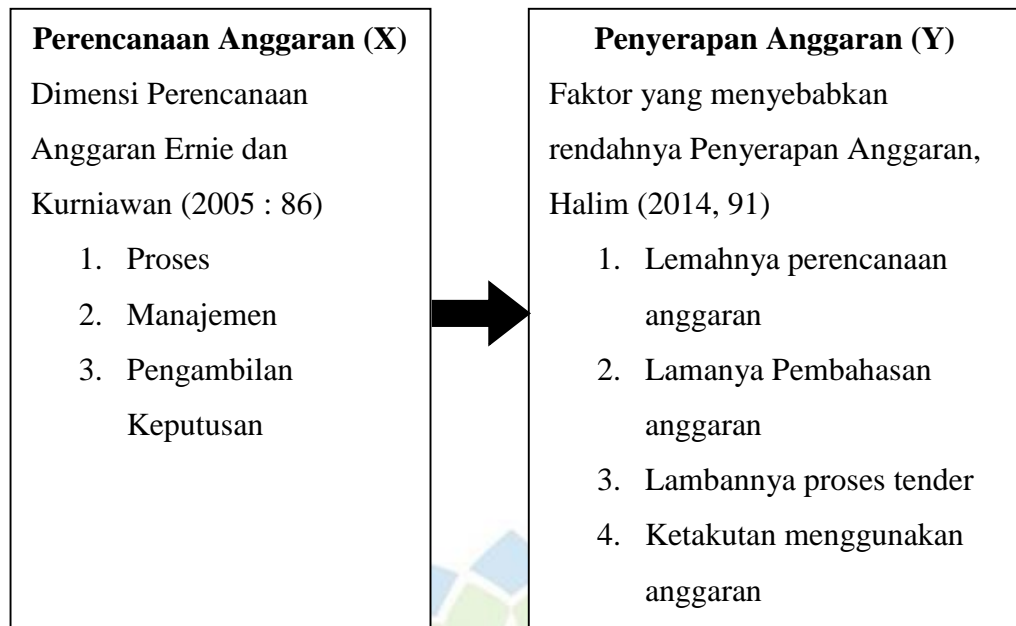
Beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.

4. Ketakutan menggunakan anggaran

Banyaknya kasus yang melibatkan kepala daerah, pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga membuat mereka takut dalam meralisasikan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi stagnan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan bahwa rencana anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kerangka pemikiran penelitian diatas dapat digambarkan secara sederhana melalui gambaran berikut ini:



### 1.7 Hipotesis

**Hipotesis dalam penelitian ini adalah :**

Ho : Tidak terdapat pengaruh Proses terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ha : Terdapat pengaruh Proses terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh Manajemen terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ha : Terdapat pengaruh Manajemen terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh Pengambilan Keputusan terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ha : Terdapat pengaruh Pengambilan Keputusan terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh Proses, Manajemen, dan Pengambilan Keputusan secara bersama-sama terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

Ha : Terdapat pengaruh Proses, Manajemen, dan Pengambilan Keputusan secara bersama-sama terhadap Penyerapan Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru.

